

BAB I

PENDAHULUAN

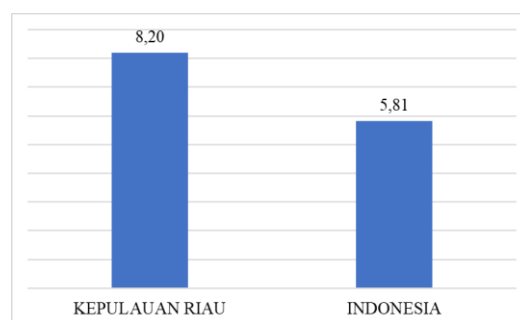
1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang tercapai serta memaksimalkan taraf kesejahteraan masyarakat sebagai dasar tujuan kegiatan perekonomian suatu negara. Namun jika tujuan yang tercapai belum maksimal akan berdampak pada tingginya pengangguran dalam suatu negara sehingga hal ini dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi yang bernilai negatif. Pengangguran dalam suatu negara permasalahan masih melahirkan tantangan bagi pemangku kepentingan sebagai peningkatan kesmakmuran dan perkembangan perekonomian indonesia. Oleh sebab itu, penekanan pengangguran tetap menjadi isu krusial dan fokus pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap 5 tahun sekali (Diniyah & Fisabilillah, 2022).

Pengangguran merupakan tantangan kritis dalam lingkup ekonomi makro yang berdampak luas pada stabilitas ekonomi suatu negara. Tingginya pengangguran sebagai masalah besar ketenagakerjaan yang harus segera diatasi (Franita & A Fuady, 2020). Pentingnya dalam mengatasi pengangguran tertuang diantara *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pendukung tenaga kerja agar memperoleh kerja yang layak dan selaras dengan tujuan SDGs 8 yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, perluasan produktivitas dan pemerataan kesempatan kerja, serta penciptaan kondisi kerja yang layak. (Aulia & Yuliana, 2022).

Seperti teori yang ditegaskan oleh George J. Borjas melalui karyanya dalam ekonomi tenaga kerja bahwa pengangguran merupakan konsekuensi logis dari ketidakseimbangan antar total tenaga kerja tersedia dan permintaan tenaga kerja oleh dunia industri. Ketika laju angkatan kerja mengalami peningkatan namun tidak diiringi dengan perluasan kesempatan kerja proporsional serta peningkatan mutu SDM, maka terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar. Situasi ini menghasilkan pengangguran terbuka, dimana individu secara aktif mencari kerja tidak memperoleh kesempatan kerja. Borjas menekan bahwa faktor insentif, seperti tingkat upah dan kebijakan pemerintah berperan signifikan menentukan partisipasi angkatan kerja. Kebijakan ekonomi yang tidak responsif terhadap perubahan struktural demografi dapat memperburuk kondisi ketenagakerjaan secara keseluruhan (Borjas, 2024). Pengangguran bukan semata mata masalah nasional, tetapi menjadi isu krusial berbagai daerah meliputi Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 1. 1 Perbandingan Rata- Rata Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber: Data diolah (Badan Pusat Statistik, 2024)

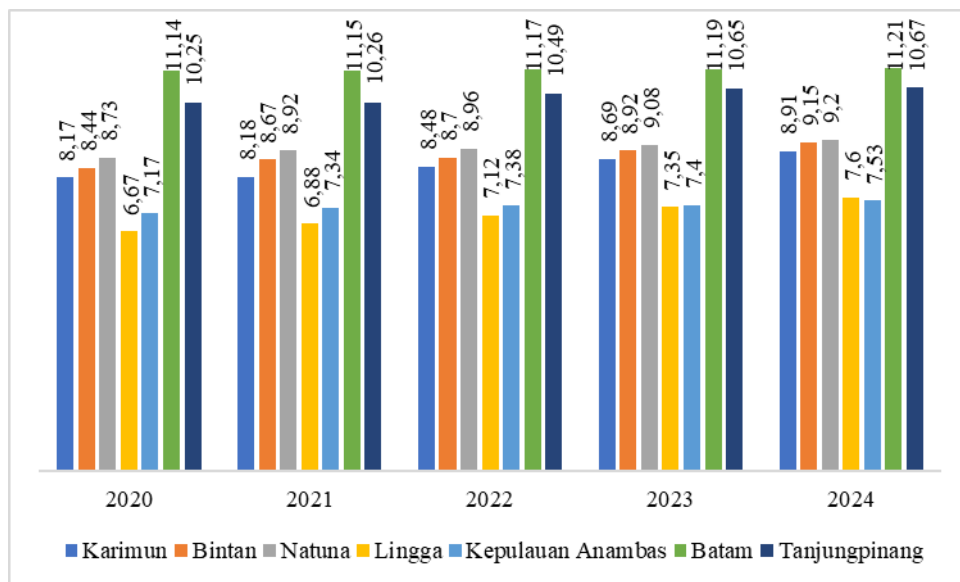
Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi lain karena menjadi kawasan perdagangan bebas dan pusat industri dengan

Kota Batam sebagai lokomotif ekonomi (Mu'minin & Yaqin, 2024). Kondisi ini menarik arus migrasi besar-besaran dari luar daerah sehingga jumlah angkatan kerja terus meningkat. Namun bersumber dari data BPS, gambar 1.1 menjelaskan rata – rata tingkat pengangguran terbuka Kepulauan Riau selama periode 2020-2024 tercatat sebesar 8,20% lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,81%. Kondisi ini mencerminkan permasalahan pengangguran serius di kepri yang ditimbulkan oleh struktur ekonomi yang bergantung pada sektor industri dan jasa serta tingginya arus migrasi pekerja dari luar daerah. Ketimpangan antara total pencari kerja dan lapangan kerja ditambah ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri menjadi faktor utama tingginya pengangguran terbuka.

Provinsi Kepulauan Riau dikenal sebagai provinsi Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) terletak di Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Mu'minin & Yaqin, 2024). Dengan letak geografis dekat dengan Singapura dan Malaysia serta berada pada persimpangan jalur perdagangan Provinsi kepulauan riau sebagai salah satu kota industri dan menjadi destinasi pendatang dari berbagai wilayah termasuk kabupaten / kota lain di kepulauan riau untuk mencari pekerjaan (D. K. Sari & Tanur, 2023). Kondisi ini mendorong ketersediaan lapangan kerja yang beragam tetapi tidak sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja yang terus meningkat. Ketidaksesuaian tenaga kerja lokal dengan kebutuhan indutri menjadikan tenaga kerja kepri kurang kompetitif yang jarus bersaing dengan pendatang maupyn pekerja dari provinsi lain.

Sektor pendidikan memegang peranan krusial dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing karena pendidikan menentukan kemampuan adaptasi produktivitas dan kesiapan individu dalam memasuki dunia kerja (Becker, 1993). Salah satu indikator alat ukur aspek pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Semakin tinggi RLS suatu wilayah menandakan semakin baiknya akses dan keberhasilan masyarakat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan sehingga meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan yang produktif (Todaro & Smith, 2020). Sebaliknya rendahnya capaian pendidikan berpotensi memperbesar *mismatch* kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran terbuka (Schultz, 1961).

Gambar 1. 2 Data Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024



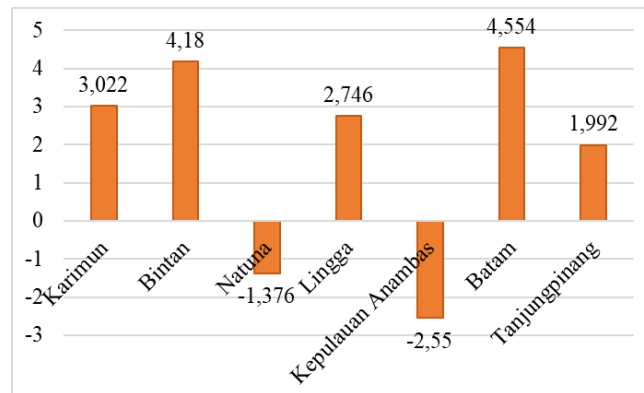
Sumber: Data diolah (Badan Pusat Statistik, 2024)

Menurut Gambar 1.2, RLS kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuatif yang cenderung naik. Kota Batam dan Tanjungpinang secara

konsisten mencatat RLS tertinggi mencapai lebih dari 10 tahun sejak 2020 menunjukkan sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Sementara itu Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas berada pada kisaran terendah yang mengindikasikan masih terbatasnya capaian pendidikan formal di wilayah tersebut. Disparitas RLS antar kabupaten/kota ini menunjukkan ketimpangan dalam akses kualitas pendidikan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan angkatan kerja dan tingkat pengangguran antar wilayah. Sebab pendidikan formal yang lebih tinggi mampu meningkatkan peluang individu untuk terserap di dunia kerja.

Menurut Sukirno (2020) unsur utama faktor produksi ada tiga yakni ketersediaan SDA, kualitas SDM, dan jumlah akumulasi modal adalah elemen utama proses produksi. Ketika terjadi peningkatan output barang dan jasa maka akan mendorong tumbuhnya ekonomi sekaligus memperbesar permintaan SDM. Namun jika produksi menurun akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang demikian menyebabkan penurunan kebutuhan sumber daya manusia. Rendahnya kebutuhan sumberdaya manusia akan menimbulkan pengangguran. Semakin besar penurunan pertumbuhan ekonomi semakin meningkatkan pengangguran (Kurniawan et al., 2015).

Gambar 1. 3 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020- 2024



Sumber : Data Diolah (Badan Pusat Statistik, 2024)

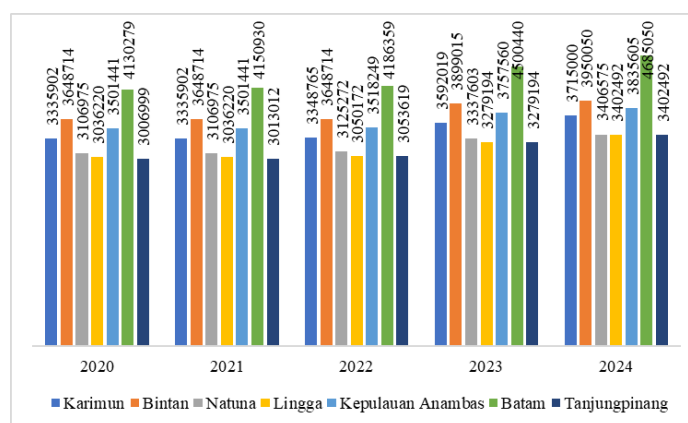
Gambar 1.3 menggambarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2020 hingga 2024. Gambar ini menyajikan variasi tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah. Kota Batam mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 4,55% yang mencerminkan perannya sebagai pusat industri, perdagangan, dan investasi nasional maupun internasional serta menjadi lokomotif pertumbuhan regional. Kemudian disusul Kabupaten Bintan dengan pertumbuhan sebesar 4,18% yang juga ditopang oleh sektor pariwisata, industri, serta program pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Sebaliknya Kabupaten Karimun mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,02%. Pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh sektor pelabuhan, pertambangan, dan transportasi laut. Kabupaten Lingga lebih didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,76%. Sementara Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih moderat yaitu sebesar 1,99%. Meskipun tidak setinggi wilayah lain, pertumbuhan di Kota Tanjungpinang

menunjukkan stabilitas ekonomi karena sektor pemerintah dan jasa. Rendahnya pertumbuhan ini berdampak langsung pada minimnya penciptaan kesempatan kerja baru, sehingga angka pengangguran terbuka relatif lebih tinggi di kedua wilayah tersebut. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di Kepulauan Riau menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan perbedaan tingkat pengangguran terbuka antar Kabupaten/Kota.

Besarnya upah yang ditawarkan menentukan proses tenaga kerja dapat terserap oleh pasar. Ketika terjadi kenaikan pada tingkat upah tenaga kerja yang diminta akan turun (I. Habibi & Marta, 2023). Apabila upah mengalami kenaikan, sedangkan input lainnya konstan hal ini mendorong perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dengan harga mahal daripada mempertahankan input lain sebagai keuntungan maksimum (Anggraini et al., 2020). Kondisi ini relevan dengan situasi di Provinsi Kepulauan Riau.

**Gambar 1. 4 Rata-Rata Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota Di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024**



Sumber : Data Diolah (Bada Pusat Statistik, 2024)

Gambar 1.4 menunjukkan dinamika yang mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, serta arah kebijakan masing-masing wilayah.

Posisi tertinggi ditempati oleh Kota Batam mengalami peningkatan UMR sebesar Rp. 4.243.236 jauh melampaui kabupate/kota lainnya. Naiknya tingkat umr diakibatkan oleh wilayah Batam yang strategis berbatasan langsung dengan Singapura yang memiliki daya saing upah yang lebih tinggi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja produktif. Namun, tingginya UMR ini juga berdampak ganda. Disatu sisi meningkatkan kesejahteraan pekerja tetapi disisi lain mendorong banyak migran masuk ke Batam sehingga memperketat persaingan di pasar kerja. Selain itu tidak semua perusahaan mampu menanggung biaya tenaga kerja yang semakin mahal, sehingga sebagian memilih untuk mengurangi perekrutan atau bahkan menunda ekspansi yang akhirnya menambah jumlah pengangguran terbuka.

Sebaliknya, wilayah dengan UMR lebih rendah Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 3.087.784 relatif kurang menjadi magnet migrasi. Namun rendahnya UMR juga mencerminkan keterbatasan sektor industri dan investasi yang pada akhirnya berimplikasi pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru. Dengan demikian, disparitas UMR antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya mempengaruhi angkatan kerja tetapi juga menjadi salah satu faktor yang menjelaskan tingginya tingkat pengangguran terbuka.

Sejumlah penelitian sebelumnya mengenai pengangguran masih berfokus pada level nasional dan provinsi. (Tsaniyah & Sugiharti, 2021) menelaah determinan pengangguran dengan cakupan makro tanpa menguraikan secara rinci variasi antar kabupaten/kota. Dengan demikian menimbulkan kesenjangan penelitian yang penting untuk diisi terutama mengingat struktur ekonomi Kepulauan Riau yang unik kaarena bertumpu pada sektor industri dan jasa yang padat karya.

Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan RLS serta mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan khususnya di wilayah-wilayah strategis seperti Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Namun data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berada diatas rata – rata nasional. Salah satu penyebab adalah derasnya arus migrasi masuk Kepulauan Riau. Berdasarkan data BPS (2022), 39% penduduk Kepulauan Riau merupakan migran. Fenomena memicu tingginya persaingan dalam pasar tenaga kerja sehingga memperbesar tekanan supai tenaga kerja. Disisi lain, struktur industri doominan di Kepulauan Riau seperti Manufaktur, logistik, dan teknologi menuntut kualifikasi tenaga kerja yang spesifik dan terampil yang seringkali tidak dimiliki oleh penduduk lokal. Ketidaksesuaian ini menyebabkan timbulnya *mismatch* tenaga kerja yaitu ketimpangan antara permintaan industri dengan kualitas SDM lokal. Kebijakan UMR yang terus meningkat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja juga berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja apabilak tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara empiris dengan judul skripsi **“ANALISIS PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Rata-Rata Lama Sekolah mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau ?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau?
3. Apakah Upah Minimum Regional mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau

1.4. Ruang Lingkup

Cakupan penelitian dalam penyusunan skripsi ditetapkan berdasarkan variabel independen terdiri dari rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional serta variabel dependen berupa tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau dalam rentang waktu tertentu dan dianalisis menggunakan pendekatan regresi data panel.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai landasan teoritis maupun memperkaya keilmuan terkait pengaruh rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2. Manfaat praktis

- a. Temuan penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi sebagai bahan acuan pemerintah dalam merumuskan intervensi strategis berkaitan dengan penanggulangan tingkat pengangguran
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dan informasi pendukung bagi studi-studi berikutnya guna memperluas wawasan ilmiah serta mendorong pembaruan dalam penelitian yang sejenis.